

KAJIAN TEORI KULTURAL DALAM KOMUNIKASI KRISIS (Studi Kasus Polusi Udara Kawasan JABODETABEK)

Alexandra Rianti Grandi Rahardjo

Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

grandialexandra98@gmail.com

Abstract

The research aims to examine the phenomenon of air pollution in Jabodetabek area using cultural theory in the context of crisis communication. Air pollution is an implication of climate change which is categorized as a wicked problem because it has a broad impact on various aspects of life. Research is important because there are several cultural groups in the Jabodetabek pollution phenomenon. These various cultural groups have different perspectives regarding the urgency of air pollution. Air pollution needs to be viewed as a problem involving cultural clashes in a human system. This makes it difficult to produce an effective solution. Solutions that focus on only one group will only produce documents without execution. Thus, the government as a policy maker needs to produce a clumsy solution that can embrace all cultural groups. The research strategy is a case study and the analysis method used is a literature review. Research data is secondary data in the form of news that can be accessed freely on digital pages. The findings prove that several government policy products show that collaboration between the government, business actors and community groups can produce effective and applicable solutions. Measurably, the air quality in the Jabodetabek area is gradually improving. This research can contribute as a practical guide for policy makers in dealing with various other wicked problems.

Keywords: *crisis communication, clumsy solution, wicked problem, cultural theory*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengkaji fenomena polusi udara di Kawasan Jabodetabek menggunakan teori kultural dalam konteks komunikasi krisis. Polusi udara merupakan implikasi dari isu perubahan iklim yang dikategorikan kedalam *wicked problem* karena berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Penelitian menjadi penting karena terdapat beberapa kelompok kultural dalam fenomena polusi Jabodetabek. Berbagai kelompok kultural tersebut memiliki perbedaan cara pandang terkait urgensi polusi udara. Polusi udara perlu dipandang sebagai permasalahan yang melibatkan pertentangan budaya dalam sebuah sistem manusia. Hal tersebut menyebabkan sulitnya menghasilkan sebuah solusi efektif. Solusi yang terpusat hanya kepada salah satu kelompok hanya akan menghasilkan dokumen tanpa eksekusi. Dengan demikian, pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu menghasilkan *clumsy solution* yang dapat merangkul seluruh kelompok kultural. Strategi penelitian merupakan studi kasus dan metode analisis yang digunakan merupakan kajian literatur. Data penelitian adalah data sekunder berupa berita yang dapat diakses bebas pada laman digital. Temuan membuktikan bahwa beberapa produk kebijakan pemerintah menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan kelompok masyarakat mampu menghasilkan solusi yang efektif dan aplikatif. Secara terukur, dapat dilihat bahwa kualitas udara Kawasan Jabodetabek berangsur-angsur membaik. Penelitian dengan ini dapat berkontribusi sebagai panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam menangani berbagai *wicked problems* lainnya.

Kata Kunci: *komunikasi krisis, clumsy solution, wicked problem, teori kultural*

PENDAHULUAN

Persepsi individu mengenai krisis dibentuk oleh berbagai faktor, salah satunya budaya (Cori et al., 2020). Dalam Cori et al. (2020) dijelaskan bahwa pada dasarnya interpretasi individu atau mengenai dunia memengaruhi pemahamannya mengenai krisis. Hal serupa diungkapkan pula dalam Zeng et al.

(2020). Penelitian Zeng et al. (2020) berargumen bahwa identitas kolektif dan pengetahuan kelompok berpengaruh terhadap pendirian kelompok, yaitu pro-lingkungan hidup atau kontra-lingkungan hidup. Kelompok pro-lingkungan hidup cenderung memiliki identitas dan cara berpikir kolektif dan berorientasi pada tujuan bersama, sedangkan

kelompok yang memiliki ikatan rendah dan berfokus pada kepentingan pribadi cenderung mengesampingkan isu lingkungan (Zeng et al., 2020). Temuan tersebut menunjukkan bahwa budaya kelompok memengaruhi cara kelompok memprioritaskan isu lingkungan. Maka, sejalan dengan Heath & O'Hair (2020), pertentangan gagasan mengenai urgensi isu lingkungan harus dilihat sebagai sebuah pertentangan sistem manusia dan praktik kolektif yang sudah dijalankan dalam jangka waktu yang panjang.

Untuk lebih memahami sumber dari pertentangan gagasan mengenai isu lingkungan, teori kultural digunakan untuk menganalisis budaya kelompok. Teori kultural memiliki argumen utama yaitu persepsi individu mengenai sebuah risiko merupakan refleksi dari komitmen kelompok tempat individu tersebut berada dan cara hidup kelompok tersebut Roeser et al. (2012). Pada prinsipnya, teori ini digunakan untuk memetakan sebuah kelompok ke dalam empat kuadran yang mencerminkan budaya kelompok tersebut. Dimensi budaya yang digunakan sebagai dasar klasifikasi adalah tingkatan diferensiasi peran (*grid*) dan daya ikat antaranggota (*group*) (Roeser et al., 2012). Pada kelompok dengan *grid* yang tinggi / hirarkis, diferensiasi pekerjaan didasari pada peran, posisi, kapasitas, dan atribut lainnya, sedangkan kelompok dengan *grid* yang rendah / egaliter cenderung mengutamakan kesetaraan dan preferensi pribadi (Johnson & Swedlow, 2021). Dimensi *group* mengacu pada kesadaran mengenai *we vs them*. Kelompok dengan *group* yang tinggi / komunitarian berarti memiliki identitas kolektif yang kuat, sedangkan kelompok dengan *group* yang rendah / individualisme berarti memiliki identitas kolektif yang lemah (Johnson & Swedlow, 2021).

Dalam konteks lingkungan hidup, teori kultural digunakan untuk menganalisis

tingkat urgensi perubahan iklim pada setiap budaya kelompok. Koehler et al. (2018) mengkaji mengenai ketersediaan air bersih di Kenya. Terdapat beberapa aktor dengan kepentingan berbeda yang terlibat dalam isu tersebut. Koehler et al. (2018) menjelaskan bahwa masyarakat umum berorientasi pada kecukupan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sehingga cenderung menanggung bersama (egaliter) risiko yang terjadi. Bahkan, dibentuk suatu asosiasi khusus yang bertugas untuk mencari solusi bersama terkait isu kelangkaan air di setiap area. Lain halnya dengan sektor privat yang berorientasi pada keuntungan (individualis). Perusahaan melakukan inovasi teknologi untuk memenuhi permintaan masyarakat, namun juga berupaya menghindari aturan yang dapat mempersempit jangkauan pasarnya (Koehler et al., 2018).

Mengkaji isu yang sama yaitu air bersih di latar berbeda, Kamerun, Tantoh & McKay (2021) memetakan pemangku kepentingan yakni pemerintah sebagai kelompok hirarkis, masyarakat sebagai kelompok egaliter, dan sektor privat sebagai kelompok individualis. Setiap kelompok mengembangkan strategi dan mekanisme masing-masing yang mengeksklusi kelompok lainnya. Terlebih, kebijakan mengenai air bersih yang bersifat *top-down* menempatkan pemerintah (hirarkis) sebagai kontrol utama dan segala keputusan tersentralisasi disana (Tantoh & McKay, 2021). Padahal, di setiap area memiliki inti permasalahan yang berbeda. Hal tersebut yang menyebabkan selalu terjadi ketidakcocokan antara solusi mengenai sumber air, pengawasan pemakaian air, dan permintaan layanan air bersih di Kamerun (Tantoh & McKay, 2021).

Mengenai sentralisasi, Nowlin (2022) menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan dalam kelompok yang sama yaitu antarnegara (hirarkis dengan hirarkis) tidak dapat

menyelesaikan permasalahan secara efektif. Diperlukan pendekatan dengan berbagai skala karena pengambilan keputusan pada skala tertentu pasti berimplikasi pada skala lain. Nowlin (2022) menggunakan istilah pendekatan polisentris. Pendekatan yang tersentralisasi hanya pada skala hirarkis menyebabkan perjanjian seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris hanya dipandang sebagai sebuah wacana tanpa aksi nyata kolektif dan berdampak. Untuk mendorong pendekatan polisentris, Nowlin (2022) berpendapat peran kelompok egalitarian perlu ditingkatkan karena hanya kelompok ini yang menjunjung kolektivisme untuk mengatasi krisis. Keberpihakan serta pemberian ruang bagi kelompok egalitarian akan berbanding lurus dengan dukungan terhadap gerakan kolektif yang lebih inklusif.

Toorzani & Rassafi (2022) mengkaji penggunaan kendaraan bermotor menggunakan teori kultural secara lebih kompleks. Toorzani & Rassafi (2022) menyatakan bahwa faktor seperti pendidikan dan usia memengaruhi budaya kelompok. Dalam isu perubahan iklim dan kaitannya dengan penggunaan kendaraan bermotor, kelompok usia lanjut termasuk ke dalam fatalis karena sudah tidak memiliki kepentingan terkait isu perubahan iklim, dan fokus pada kualitas hidup di hari tua. Kelompok usia muda termasuk ke dalam kelompok individualis karena berfokus pada kebutuhan pragmatis daripada kesepakatan sosial mengenai perubahan iklim. Selain itu, kelompok berpendidikan tinggi cenderung hirarkis dan pro-lingkungan hidup, sedangkan pada tingkat masyarakat umum yang egaliter justru tidak menunjukkan dukungan signifikan terhadap perubahan iklim (Toorzani & Rassafi, 2022).

Perbedaan kultural menurut Walker et al. (2022) menjadi penghalang bagi terciptanya solusi terkait perubahan iklim. Hal

ini karena budaya memiliki implikasi yang luas hingga ke kebijakan politik dan ekonomi. Sebagian menganggap isu lingkungan adalah prioritas dan darurat, sebagian merasa ancaman perubahan iklim tidak nyata. Walker et al. (2022) berargumen bahwa selain perlu memahami cara pandang kultural sebuah kelompok mengenai isu lingkungan, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh kelompok termasuk akar rumput. Aktivisme yang bersifat kolaboratif dapat mendorong transformasi kultural yang pada akhirnya menghasilkan solusi bersama terkait isu perubahan iklim (Walker et al., 2022).

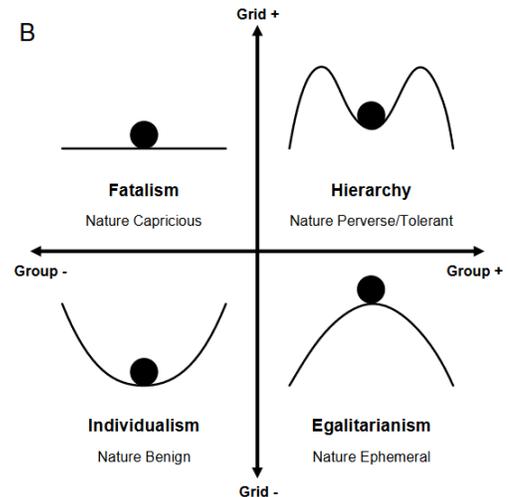
Perbedaan kultural pada kelompok/institusi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, Aktor yang sama akan memiliki kepentingan yang berbeda ketika sedang merepresentasikan kelompok tertentu, namun Koehler et al. (2018) menyatakan bahwa aktor dengan kepentingan berbeda tetap dapat berjalan berdampingan bahkan bekerja sama. Tantoh & McKay (2021) juga menekankan bahwa tidak ada solusi yang dapat merepresentasikan kepentingan dan preferensi seluruh pemangku kepentingan. Budaya sendiri bersifat dinamis sehingga pendekatan terhadap krisis harus fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi pada saat itu. Menyadari hal tersebut, maka pada suatu titik, seluruh kelompok harus mengkolaborasikan strategi untuk menghasilkan solusi yang paling tidak memenuhi kebutuhan setiap kelompok. Maka, McNeeley & Lazrus (2014) secara lebih spesifik menjelaskan mengenai “*clumsy solutions*”, yang mengacu pada upaya-upaya kreatif dan fleksibel yang dapat mengakomodasi berbagai cara pandang kultural.

Clumsy solutions memiliki argumen utama bahwa segala bentuk upaya yang tidak mengkombinasikan seluruh cara hidup /

budaya tidak akan efektif karena prioritas pada satu kelompok budaya akan diabaikan oleh kelompok lainnya (Verweij, 2023). Permasalahan sosial yang bersifat kompleks harus menciptakan tujuan bersama dari seluruh kelompok budaya agar bisa diselesaikan secara efektif (Verweij, 2023). Permasalahan yang membutuhkan suatu *clumsy solution* disebut *wicked problem* (Ney & Meinel, 2019). Ney & Meinel (2019). *Wicked problem* adalah permasalahan kompleks yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- *Wicked problem* tidak memiliki waktu dimana masalah tersebut akan reda/berhenti
- Solusi bukan tentang benar salah tapi baik atau buruk
- Solusi bersifat *one-shot* karena tidak ada waktu untuk percobaan, setiap upaya dihitung dan berdampak
- Tidak memiliki solusi atau tata langkah yang mungkin dapat menyelesaikan permasalahan
- Permasalahan bersifat unik
- Permasalahan yang muncul dapat diindikasikan sebagai gejala dari permasalahan lain yang akan muncul
- Terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai aspek dan harus terdapat penjelasan untuk setiap solusi yang dipilih

- Pengambil keputusan atau pembuat kebijakan tidak memiliki hak/waktu untuk salah bersikap



Gambar II. Pandangan setiap kelompok mengenai lingkungan
(Sumber : Chuang et al. (2020))

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme. Paradigma ini berupaya melengkapi paradigma positivisme yang cenderung mengesampingkan subjektivisme individu (Neuman, 2011). Paradigma post-positivisme memandang bahwa teori mapan penting untuk menjadi acuan makna subjektif tetap perlu untuk digali terutama dalam penelitian yang kontekstual (Given, 2008). Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan fenomena polusi udara di kawasan Jabodetabek dalam kurun waktu Agustus 2023 hingga Oktober 2023 sebagai kasus kunci. Kriteria pemilihan kasus kunci didasari pada karakteristik strategi studi kasus yang meneliti fenomena temporer dan kontekstual (Yin, 2018). Secara konteks, fenomena polusi udara merupakan bagian dari isu besar perubahan

iklim dan merupakan fenomena terkini.

Data penelitian merupakan data sekunder berupa berita yang dapat diakses bebas dalam laman-laman digital. Peneliti kemudian melakukan kajian pustaka sistematis. Kajian literatur memberikan langkah sistematis untuk mensintesis gagasan penelitian-penelitian terdahulu untuk mengembangkan fondasi pemahaman dan membuka kemungkinan pengembangan teori (Snyder, 2019). Literatur meliputi kajian mengenai teori kultural, komunikasi risiko, komunikasi krisis, dan penggunaan teori kultural dalam isu perubahan iklim. Sintesis gagasan literatur tersebut kemudian digunakan untuk memahami kasus kunci secara teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Darurat Polusi Udara

Per September 2023, indeks kualitas udara di Jakarta termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Bahkan, Jakarta menempati peringkat pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia (Mae, 2023). Tidak hanya Jakarta, sejumlah kota seperti Tangerang, Tangerang Selatan, Karawang, hingga Depok menempati sepuluh besar kota paling berpolusi di Indonesia (Setiawati, 2023). Kondisi darurat polusi udara berimplikasi serius terhadap perubahan iklim. Konsentrasi polutan dalam udara dapat mengganggu kestabilan iklim karena memperburuk kualitas ozon. Kualitas ozon yang buruk menangkap suhu panas di bumi dan gagal melepaskannya ke atmosfer (efek rumah kaca) sehingga suhu di bumi terus meningkat. Hal ini yang menyebabkan gelombang panas, kebakaran hutan berkepanjangan, dan perubahan iklim berupa musim kemarau panjang. Dengan demikian, polusi udara jika dibiarkan akan

berkembang menjadi isu regional bahkan global.

Melihat bahwa polusi udara memiliki implikasi yang luas dan menyinggung aspek kehidupan lainnya, maka polusi udara dapat dikategorikan sebagai *wicked problem*. Selain itu, polusi udara di area Jabodetabek juga melibatkan berbagai kelompok budaya dengan kepentingan yang saling bertentangan. Dengan demikian, diperlukan upaya kolaboratif dengan semua kelompok untuk menghasilkan solusi. Tidak cukup hanya dengan pendekatan *top-down* dari pemerintah. Namun demikian, pemerintah sebagai regulator perlu membangun strategi komunikasi krisis yang tepat untuk penyelesaian yang efektif. Diperlukan adanya analisis kultural untuk memetakan kepentingan tersebut. Dibutuhkan pula sebuah *clumsy solution* untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kondisi Darurat Polusi Udara Jabodetabek Dikaji dengan Teori Kultural

Jika dikaji menggunakan teori kultural, pemerintah termasuk ke dalam kelompok hirarkis. Menurut Chuang et al. (2020), kelompok hirarkis memiliki *grid* / regulasi sosial dan *group* / integrasi sosial yang tinggi. Kelompok ini mengadopsi pola hidup kolektif yang berkaitan erat dengan otoritas dan diferensiasi peran. Bagi kelompok hirarkis, alam merupakan sesuatu yang memiliki titik normal. Pada satu titik alam akan mengalami krisis, namun akan kembali ke titik normal. Disinilah peran kelompok hirarkis yakni sebagai regulator yang mengembalikan alam ke titik normal (Chuang et al., 2020). Dalam fenomena polusi udara di Jabodetabek, kelompok hirarkis yang mengambil peranan adalah pemerintah daerah yaitu Pemprov,

Kementerian Lingkungan Hidup serta Dinas Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Perindustrian.

Aktor-aktor yang terlibat memandang bahwa otoritas yang dimiliki harus digunakan untuk memperbaiki krisis alam. DPR RI mendorong diberlakukannya kebijakan bekerja dari rumah karena diketahui bahwa penyumbang polutan terbesar adalah kendaraan bermotor pribadi. Namun, disampaikan dalam Setjen DPR RI (2023), kebijakan tersebut harus didukung pula oleh kebijakan di tingkat daerah. Di sisi lain, Menko PMK menyatakan bahwa bekerja dari rumah tidak akan efektif mengatasi polusi dan rekayasa cuaca dianggap akan berpengaruh lebih besar (Akbar, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok hirarkis sangat mengandalkan kekuatan regulasi *top-down* bahkan konsiderasi pembuatan kebijakan cenderung tidak terintegrasi, dengan kata lain hanya menyesuaikan kepentingan instansi tertentu. Sesuai dengan Nowlin (2022); Tantoh & McKay (2021), solusi yang tersentralisasi hanya pada kelompok hirarkis cenderung kurang efektif untuk menyasar masalah utama.

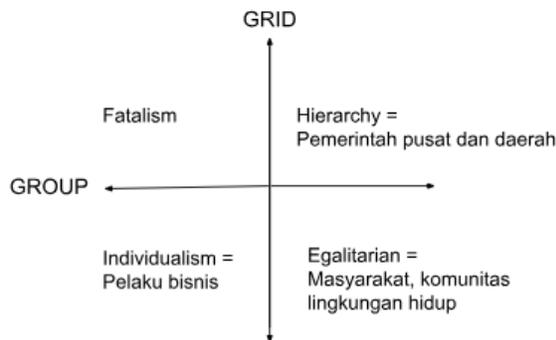
Di sisi lain, industri yaitu pabrik-pabrik merupakan kelompok individualis. Kelompok ini mengutamakan kebebasan ekonomi, liberalisasi, dan dijiwai semangat kewirausahaan (Yuan et al., 2022). Terkait pandangannya terhadap alam, kelompok individualis memandang bahwa alam akan tangguh menghadapi gejolak yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dengan sendirinya akan terus berkompetisi dan berinovasi untuk memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan, namun alam dengan sendirinya pula akan kembali ke titik equilibrium dan memulihkan diri (Chuang et al., 2020). Nilai kolektif pada kelompok

ini tidak terlalu kental dan didominasi oleh kepentingan pribadi (Koehler et al., 2018).

Di Jabodetabek, misalnya, sebanyak empat perusahaan *stockpile* batu bara diberhentikan kegiatannya karena tidak memiliki Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang rinci (BBC News, 2023). Diketahui warga telah melaporkan perusahaan tersebut sejak tahun 2018 karena keluhan limbah, namun tidak pernah ada penindakan. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa pabrik tersebut bisa beroperasi sejak awal jika belum memiliki perencanaan yang jelas (Wijaya, 2023). Beberapa pabrik di Jawa Barat yang bergerak di bidang industri batu bara dan kertas juga ditutup karena tidak dapat mengolah limbah sesuai ketentuan. Hal yang dipersoalkan adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat memanfaatkan *loophole* kebijakan lingkungan hidup. Kenyataan ini sesuai dengan Koehler et al. (2018) bahwa kelompok individualis memposisikan bisnis di atas kesadaran lingkungan dan menggunakan lingkungan untuk kepentingan bisnis.

Sementara itu, masyarakat sebagai kelompok egalitarian memiliki pendirian berbeda. Kelompok egalitarian merupakan kelompok dengan ikatan sosial yang tinggi dan menolak adanya stratifikasi sosial karena memicu ketidaksetaraan (Chuang et al., 2020). Bagi kelompok ini, lingkungan bersifat rentan dan harus dilindungi. Segala bentuk eksploitasi alam akan memicu ketidaksetaraan dalam masyarakat (Chuang et al., 2020). Dalam permasalahan polusi di Jabodetabek, organisasi masyarakat yang bersifat independen yakni WALHI merupakan kelompok egalitarian. Dalam beberapa pernyataannya WALHI seringkali memposisikan diri sebagai pihak

yang mempertanyakan keputusan-keputusan pemerintah. Mengenai fenomena polusi, WALHI menyebutkan bahwa ambisi pemerintah untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik tidak akan mengatasi permasalahan polusi (Silaban, 2023). Silaban (2023) menyebutkan bahwa kendaraan listrik justru akan mendorong kecenderungan penggunaan secara pribadi dan meningkatkan pemrosesan nikel yang menimbulkan permasalahan ekologis lainnya. Hal ini sesuai dengan Chuang et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kelompok egalitarian melihat risiko apapun terhadap alam adalah sebuah ancaman.



Gambar III. Kelompok kultural dalam fenomena polusi udara Jabodetabek

Pendekatan Kolaboratif Polusi Udara Jabodetabek

Melihat bahwa terdapat kepentingan yang bertentangan di antara setiap kelompok, pemerintah akhirnya berkolaborasi dengan semua pihak yaitu industri dan kelompok masyarakat. Penerapan sistem kerja hybrid, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, uji emisi kendaraan, mendorong penggunaan transportasi publik, hingga pengelolaan limbah industri adalah contoh solusi-solusi kolaboratif yang diinisiasi pemerintah

(Humas Sekretariat Kabinet RI, 2023). Inisiatif tersebut kemudian dituangkan dalam suatu keputusan resmi yaitu Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Instruksi bersifat taktis sehingga berorientasi langsung pada penerapan/pemberlakuan dan mengikat kelompok hirarkis yaitu Gubernur, Wali Kota, dan Bupati di wilayah Jabodetabek.

Dalam pelaksanaannya, instruksi tersebut tidak hanya tersentralisasi pada kelompok hirarkis namun juga melibatkan kelompok individualis/industri dan egalitarian/masyarakat. Kementerian melakukan pendekatan industri hijau dengan menginstruksikan pemasangan alat pengendali pencemaran udara, menempatkan petugas penanggung jawab pengendali pencemaran udara beserta operator instalasi yang tersertifikasi, dan pemantauan yang secara *real time* dilaporkan ke dinas terkait (Kemenperin, 2023). Pelaku bisnis dalam hal ini diberikan pembinaan dan pendampingan oleh Kementerian Perindustrian agar melaksanakan praktik bisnis sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan industri hijau. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok individualis bukan hanya berperan sebagai entitas yang dipantau oleh kelompok hirarkis untuk kemudian diberikan *reward/punishment*, namun sebagai bagian dari solusi kolaboratif.

Menyadari bahwa penyumbang emisi terbesar adalah transportasi pribadi, dan merespon kelompok egalitarian yang menjunjung kesetaraan, pemerintah kini mengembangkan fasilitas transportasi publik secara serius. DKI Jakarta merupakan provinsi pionir yang mengintegrasikan transportasi publik. Hingga kini terdapat 52

unit bus listrik Transjakarta dan dalam upaya mengatasi polusi udara, hingga akhir tahun 2023 akan ditambah hingga mencapai 100 unit (Dishub DKI Jakarta, 2023). Layanan ini juga terintegrasi dengan layanan transportasi MRT, LRT, hingga KRL. Hal ini sekali lagi menunjukkan upaya pemerintah menciptakan solusi kolaboratif. Sebelumnya, masyarakat sebagai kelompok egaliter hanya dituntut untuk mengubah pola mobilisasi dari pribadi ke komunal tanpa pernah dipikirkan kesiapan fasilitasnya (Afriansyah & Kusumaningrum, 2023). Kini, tidak mengambil pendekatan *top-down* pemerintah mulai berangkat dari permasalahan akar masyarakat.

KESIMPULAN

Situasi krisis tidak dapat dipahami hanya dari satu sisi, seolah-olah sumber dan penyelesaian krisis terpusat pada suatu peran/kelompok (Heath & O'Hair, 2020). Teori kultural menunjukkan bahwa terdapat empat kelompok budaya besar yang diklasifikasikan berdasarkan stratifikasi dan ikatan dalam kelompok, yaitu fatalisme, hirarkis, individualis, dan egalitarian. Perbedaan budaya ini membentuk persepsi terhadap krisis. Dalam konteks isu lingkungan, setiap kelompok memiliki pandangan mengenai tingkat urgensi perubahan iklim yang berbeda (Cori et al., 2020).

Polusi udara Jabodetabek menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan *wicked problem*. Chuang et al (2020) menjelaskan pengelompokan kultural dalam isu perubahan iklim. Pemerintah sebagai kelompok hirarkis memandang bahwa polusi hanya akan dapat teratasi menggunakan pendekatan *top-down*, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan. Hal ini menyebabkan solusi yang terpusat pada kelompok hirarkis pada akhirnya tidak

dieksekusi karena tidak sesuai dengan situasi khas di setiap daerah. Di sisi lain, para pelaku bisnis sebagai kelompok individualis meyakini bahwa kualitas udara dengan sendirinya akan kembali ke titik equilibrium dan alam memang difungsikan untuk membantu memenuhi kepentingan manusia.

Hal ini yang menyebabkan seringkali kelompok individualis menggunakan celah dari aturan yang dibuat oleh kelompok hirarkis untuk kepentingan bisnisnya. Sedangkan, kelompok egalitarian melihat kualitas udara sebagai sesuatu yang perlu dilindungi dan segala kegiatan yang memberi Dengan demikian, solusi kolaboratif yang telah dilakukan yang datang dari semua pihak menjelaskan penyebab kualitas udara Jabodetabek yang berangsur-angsur membaik (Verweij et al., 2006).

REFERENSI

- Afriansyah, A., & Kusumaningrum, D. (2023, August 28). *Polusi Jakarta: Perlu transportasi publik berkualitas untuk menghadirkan udara bersih di ibu kota*. The Conversation. <http://theconversation.com/polusi-jakarta-perlu-transportasi-publik-berkualitas-untuk-menghadirkan-udara-bersih-di-ibu-kota-211909>
- Akbar, A. (2023, Agustus). *Muhadjir Tak Akan Terapkan WFH untuk Kurangi Polusi, Desak Rekayasa Cuaca*. <https://news.detik.com/berita/d-6888623/muhadjir-tak-akan-terapkan-wfh-untuk-kurangi-polusi-desak-rekayasa-cuaca>
- BBC News. (2023, August 24). *Polusi udara: KLHK hentikan kegiatan empat perusahaan, warga Marunda: "Kenapa baru sekarang?"* BBC News Indonesia.

- <https://www.bbc.com/indonesia/artikles/cjr28lgyynnno>
- C. N. N. Indonesia. (2023, Agustus). *Kemenkes: Kasus ISPA Jabodetabek Melonjak, Tembus 200 Ribu per Bulan*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230828125502-20-991360/kemenkes-kasus-ispajabodetabek-melonjak-tembus-200-ribu-per-bulan>
- Chuang, F., Manley, E., & Petersen, A. (2020). The role of worldviews in the governance of sustainable mobility. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(8), 4034–4042.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1916936117>
- Cori, L., Bianchi, F., Cadum, E., & Anthonj, C. (2020). Risk Perception and COVID-19. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9), 3114.
<https://doi.org/10.3390/ijerph17093114>
- Dishub DKI Jakarta. (2023, Agustus). *Transportasi Publik Yang Bermanfaat Untuk Mengurai Kemacetan Dan Ramah Lingkungan – DISHUB DKI JAKARTA*.
<https://dishub.jakarta.go.id/2023/08/23/transportasi-publik-yang-bermanfaat-untuk-mengurai-kemacetan-dan-ramah-lingkungan/>
- Given, L. (2008). *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. SAGE Publications, Inc.
<https://doi.org/10.4135/9781412963909>
- Heath, R. L., & O’Hair, H. D. (Eds.). (2020). *Handbook of Risk and Crisis Communication* (1st ed.). Routledge.
- <https://doi.org/10.4324/9781003070726>
- Humas Sekretariat Kabinet RI. (2023, August 23). *Mendagri Terbitkan Instruksi Pengendalian Pencemaran Udara di Jabodetabek*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
<https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-instruksi-pengendalian-pencemaran-udara-di-jabodetabek/>
- Johnson, B. B., & Swedlow, B. (2021). Cultural Theory’s Contributions to Risk Analysis: A Thematic Review with Directions and Resources for Further Research. *Risk Analysis*, 41(3), 429–455.
<https://doi.org/10.1111/risa.13299>
- Kemenperin. (2023, Agustus). *Kemenperin: Sektor Industri Tertib Aturan Pengendalian Emisi*.
<https://kemenperin.go.id/artikel/24263/Sektor-Industri-Tertib-Aturan-Pengendalian-Emisi>
- Koehler, J., Rayner, S., Katuva, J., Thomson, P., & Hope, R. (2018). A cultural theory of drinking water risks, values and institutional change. *Global Environmental Change*, 50, 268–277.
<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.03.006>
- Mae. (2023, September 2). *Pak Luhut, Polusi Jakarta Hari Ini Memburuk! Luar Jawa Merah*. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230902063815-128-468365/pak-luhut-polusi-jakarta-hari-ini-memburuk-luar-jawa-merah>

- Manzi, T. (2007). Cultural Theory and the Dynamics of Organizational Change: The Response of Housing Associations in London to the *Housing Act 1988*. *Housing, Theory and Society*, 24(4), 251–271. <https://doi.org/10.1080/14036090601149180>
- McNeeley, S. M., & Lazrus, H. (2014). The Cultural Theory of Risk for Climate Change Adaptation. *Weather, Climate, and Society*, 6(4), 506–519. <https://doi.org/10.1175/WCAS-D-13-00027.1>
- Neuman, W. L. (2011). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed). Allyn & Bacon.
- Ney, S., & Meinel, C. (2019). Clumsy Solutions, Messy Institutions and Cultural Change. In S. Ney & C. Meinel, *Putting Design Thinking to Work* (pp. 43–72). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19609-7_3
- Nowlin, M. C. (2022). Who should “do more” about climate change? Cultural theory, polycentricity, and public support for climate change actions across actors and governments. *Review of Policy Research*, 39(4), 468–485. <https://doi.org/10.1111/ropr.12468>
- Rachman, A. (2023, Agustus). *Pasien ISPA Meroket Akibat Polusi, Menkes Akhirnya Buka Suara*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230824102126-4-465719/pasien-ispameroket-akibat-polusi-menkes-akhirnya-buka-suara>
- Roeser, S., Hillerbrand, R., Per Sandin, & Peterson, M. (2012). *Handbook of risk theory*. 2. Springer.
- Setiawati, S. (2023, September 6). *Polusi Jakarta Masih Buruk, Jawa Barat Dapat Warning Keras!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230906071929-128-469670/polusi-jakarta-masih-buruk-jawa-barat-dapat-warning-keras>
- Setjen DPR RI. (2023, Agustus). *Puan: Aturan WFH di DKI Harus Didukung Kebijakan Daerah Penyangga*. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45978>
- Silaban, M. W. (2023, January 5). *Soal Insentif Kendaraan Listrik, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi Penggunaan Energi Bersih*. Tempo. <https://bisnis.tempo.co/read/1675933/soal-insentif-kendaraan-listrik-walhi-bukan-sepenuhnya-solusi-penggunaan-energi-bersih>
- Snyder, H. (2019). *Literature review as a research methodology: An overview and guideline*. 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tantoh, H. B., & McKay, T. J. M. (2021). Assessing community-based water management and governance systems in North-West Cameroon using a Cultural Theory and Systems Approach. *Journal of Cleaner Production*, 290, 125804. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125804>
- Toorzani, A. A., & Rassafi, A. A. (2022). The effect of cultural values on pro-environmental attitude in the context

- of travel mode choice: A hierarchical approach. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 88, 291–308. <https://doi.org/10.1016/j.trf.2022.05.009>
- Verweij, M. (2023). Clumsy solutions and climate change: A retrospective. *WIREs Climate Change*, 14(1), e804. <https://doi.org/10.1002/wcc.804>
- Walker, T., Wendt, S., Goubran, S., & Schwartz, T. (Eds.). (2022). *Business and Policy Solutions to Climate Change: From Mitigation to Adaptation*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-86803-1>
- Wijaya, L. D. (2023, September 1). *Forum Masyarakat Rusun Marunda Kritik DKI Baru Gencar Sanksi Perusahaan Stockpile Batu Bara*. Tempo. <https://metro.tempo.co/read/1766768/forum-masyarakat-rusun-marunda-kritik-dki-baru-gencar-sanksi-perusahaan-stockpile-batu-bara>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (Sixth edition). SAGE.
- Yuan, M., Zeng, J., Swedlow, B., & Qi, R. (2022). Environmental concern among Chinese youth: The roles of knowledge and cultural bias. *Environmental Education Research*, 28(10), 1472–1489. <https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2033705>
- Zeng, J., Jiang, M., & Yuan, M. (2020). Environmental Risk Perception, Risk Culture, and Pro-Environmental Behavior. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(5), 1750. <https://doi.org/10.3390/ijerph17051750>